



INFRASTRUKTUR PARIWISATA

## Moratorium Hotel Perlu Diperpanjang

**UMBULHARJO—** Pengelola hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, mendorong Pemerintah Kota Jogja memperpanjang moratorium pembangunan hotel sampai 2021.

Ujang Hasanudin  
hasanudin@harianjogja.com

Alasannya jumlah hotel terlalu banyak, sementara tingkat hunian hotel masih di bawah rata-rata. "Periode Januari-Juli tahun ini saja tingkat hunian hotel bintang rata-rata masih di angka 58% dan hotel nonbintang 20%. Idealnya tingkat hunian sudah di atas 60%," kata Ketua PHRI DIY, Istidjab Danunagoro, saat dihubungi Selasa (26/9).

Istidjab mengatakan, saat libur panjang hanya hotel-hotel dalam ring satu atau kawasan Malioboro yang mencapai angka di atas 60% tingkat hunian. Sementara lainnya di bawah angka 60%. Sementara jumlah hotel masih terus bertambah. Sebab, meski moratorium diberlakukan setiap tahun sejak 2014, banyak hotel yang sudah mendapatkan izin lebih dulu sebelum moratorium diberlakukan.

▶ Saat libur panjang hanya hotel-hotel di Malioboro yang mencapai angka di atas 60% tingkat hunian.

▶ Jual beli hotel sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.

Dalam catatanannya sejak 2014 ada 110 izin hotel, dan sekitar 78 hotel di antaranya sudah dibangun. Sementara sisanya masih terus dalam proses pembangunan. "Jadi setiap tahun dipastikan ada hotel baru dibangun karena sudah memiliki izin," kata Istidjab.

Sementara jumlah kamar hotel sampai saat ini untuk hotel bintang ada sekitar 8.500-an kamar, dan hotel nonbintang sekitar 13.500-an kamar. Sejahtah ini, diakui Istidjab, tingkat hunian hotel juga masih didominasi wisatawan nusantara

ketimbang wisatawan mancanegara. Karena itu, dalam pekan ini, PHRI DIY segera menyampaikan usulan tertulis terkait dengan moratorium pembangunan hotel ke Pemerintah Kota Jogja. "Besok [hari ini] atau lusa kami akan menemui Wali Kota Jogja," ujar Istidjab.

Ia menambahkan, September tahun lalu PHRI sebenarnya sudah minta moratorium sampai 2019, namun melihat kondisi saat ini, kata dia, moratorium perlu diperpanjang sampai empat tahun ke depan.

Soal maraknya penjualan hotel di beberapa situs penjualan daring, Istidjab mengaku, jual beli hotel sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Menurut dia, banyak pembangunan hotel dilakukan oleh pengembang bukan pemilik langsung hotel. Mereka memang sengaja membangun hotel untuk dijual kembali setelah hotel jadi.

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena komunitasnya hanya mengakomodasi pengelolaan hotel, tidak sampai menyentuh soal bangunannya. "Kami hanya perkumpulan operasional hotel, tidak tahu menahu soal kepemilikannya," ucap Istidjab.

**Pertimbangkan**

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, beberapa waktu lalu menyatakan dirinya akan mempertimbangkan kembali perpanjangan moratorium hotel, namun pihaknya butuh masukan dari berbagai pihak, terutama PHRI. "Moratorium kan masih berlaku sampai Desember nanti, ya kami lihat nanti [perpanjang atau tidak]," kata Haryadi.

	Nilai Berita	
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Am
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Seg
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Bias
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005